



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ERWANTO
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 503735

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/54 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 151.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, YAMAHA R25 R25 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.238.500.000
III. HUTANG	Rp.	156.983.734
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.081.516.266

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.